

DAFTAR BACAAN

Buku

Banyara Sangadji, *et.al.*, *Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang-undang Pokok Agraria Di Kecamatan Sirimau, Kejora Timur, Ambon*, 2017.

Kusbianto, 2010, *Konflik Di Perkebunan*, USU Press, Medan, 2010.

Rachman Sutanto, *Dasar-dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Rachman Sutanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Staf Presiden Republik Indonesia, *Pelaksanaan Reforma Agraria*, Jakarta, 2013.

Sugianto, & Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Jurnal

Adi Gunawan, *Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005, Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 2 Issue 1, PP. 1-10, ISSN 2502-3136, 2017.

Budi Sunanda et.al, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11/ Pdt.G/ 2008/ PN-BIR, tanggal 23 Februari 2009), *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN 2302-0180 pp. 106-115 Vol.2 No.1.

Giovanni Rondonuwu, Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, *Lex Privatum Vol.V No.4*, 2017.

Herman Soesangobeng, "Tanah dan Hak Ulayat", Makalah disampaikan dalam *Seminar Pertanahan Balitbang Dep. Keh. HAM*, Jakarta, 4 November 2003.

Mochtar, H. Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No2*, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Rosalinda E. L., Aspek Hukum Penyediaan Tanah Untuk Lahan Perindustrian. *Jurnal Gema Aktualita, Vol. 4 No. 2*, 2015.

Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1*, 2012.

-----, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Perusahaan Swasta. jurnal PERSPEKTIF Volume XV No. 3*, 2010.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Christina Octavia, Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum (Tinjauan Yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota bekasi, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Atau Undang-Undang Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Negara Agraria Bpn Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perizinan Hak Izin Lokasi.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
143/G/2013/PTUN-BDG.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143
PK/TUN/2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 570/PDT/2017/PT.BDG.